

## Konsep *Value For Money* untuk Pengukuran Kinerja pada Kantor Imigrasi Pangkalpinang

Yunita Maharani<sup>1</sup>, dan Rafika Sari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi STIE IBEK Pangkalpinang, dan <sup>2</sup>Universitas Indo Global Mandiri Palembang, Indonesia

<sup>1</sup>[yunita7691@yahoo.co.id](mailto:yunita7691@yahoo.co.id), <sup>2</sup>[Rafikasari@yahoo.co.id](mailto:Rafikasari@yahoo.co.id)

### Abstract

*This study aimed to determine the implementation of the concept of value for money in the management immigration office pangkalpinang. The research method was qualitative methods. Qualitative method in this research was, the author conducted an analysis of data in the form of information, collecting tangible data figures calculation results statistically, general description of the object of research, applying the concept of value for money immigration office pangkalpinang that had been economical, efficient and effective. This research is a descriptive by analyzing progress report of immigration in pangkalpinang 2019-2020. The results of the research concludes that the performance immigration office on has been: 1) economically with economy ratio averagely under 100%; 2) efficiently conducted with efficiency averagely under 100%; 3) effectively conducted with effectivenessration of 100% in average. Good Government Governance can be realized in immigration office if viewedbased on the calculation with the concept of value for money, because it had been economical, efficient and effective.*

**Keywords:** *economical, efficient and effective*

### 1. Pendahuluan

Trend era digitalisasi terkini, berbagai info apapun dengan mudah bisa akses oleh publik melalui internet termasuk laporan keuangan pemerintah. Hal ini membuat sebagian masyarakat semakin cerdas dan kritis terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintah sehingga publik menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas. Sejak konsep anggaran berbasis kinerja diterapkan, semua pemerintahan baik pusat maupun daerah dituntut mampu menghasilkan kinerja keuangan dengan baik. Pelaksanaan ini dapat dimulai dari unit-unit kerja masing-masing, sehingga diharapkan lembaga negara dapat mengurangi terjadinya pemborosan, sumber kebocoran dana, dan mendeteksi program-program yang tidak tepat guna agar beban anggaran belanja negara tiap tahun bisa menjadi efisien.

Dari hasil pengamatan peneliti secara langsung, masih banyak pelayanan publik terkesan jauh dari kata profesional, lamban, dan mengeluarkan biaya yang mahal dalam pelayanan, hal ini masih

menjadi tugas pemerintah untuk melakukan perubahan ke arah lebih baik dalam birokrasi di negeri ini. Maka dari itu selain kinerja keuangan yang transparansi diperlukan juga prinsip-prinsip *good governance*. Menurut (Mardiasmo, 2009) *good governance* merupakan suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik kepada pemerintahan yang baik. Maka dari itu di dalam tata kelola pemerintah di perlukan adanya transparansi dan akuntabilitas. Menurut (Halim dan Iqbal, 2012) mengemukakan bahwa Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Selanjutnya menurut (Khikmah, 2014) ukuran kinerja

pemerintah berdasarkan anggaran berbasis kinerja dapat diukur menggunakan konsep *value for money*, yakni ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ruang lingkup ekonomi meliputi pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Efisien menyangkut pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu, sedangkan efektivitas berkaitan erat terhadap tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Dalam hal ini tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *Value for Money*, yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Dari ketiga elemen pokok *Value for Money* tersebut, beberapa pihak berpendapat bahwa tiga elemen saja belum cukup, sehingga perlu ditambah dua elemen lain yaitu keadilan (*equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*equality*) (Mardiasmo, 2009). Disisi lain juga pemerintahan dan lembaga negara dituntut juga fokus pada pembangunan zona integritas menuju WBK atau WBBM yang bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini tercermin pada kantor Imigrasi Kota Pangkalpinang yang mendapat predikat WBK tahun 2019.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1. Teori *Stewardship*

Menurut Donaldson dan Davis (1991), teori *stewardship* merupakan teori yang

mendeskrripsikan para manajer yang lebih mementingkan tujuan organisasi daripada kepentingan individu. Teori *stewardship* dapat juga menjelaskan adanya hubungan yang saling terkait antara keberhasilan organisasi dengan tingkat kepuasan. Kesuksesan dalam tingkat organisasi dapat dicapai dengan memaksimalkan *utilitas principals* dan manajemen. Dengan kata lain, *stewardship theory* dapat tercapai apabila memaksimalisasi *utilitas principals* dan manajemen dalam tingkat organisasi. Teori *stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya (Haliah, 2012).

Dalam hal ini Kantor Imigrasi pangkalpinang selalu berupaya mewujudkan pelaksanaan *good governance* dan WBK WBBM. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam pembuatan laporan keuangan, Kantor Imigrasi harus mengungkapkan secara jelas dan rinci terkait data akuntansi dan informasi-informasi lainnya secara relevan. Pihak internal maupun eksternal dapat memanfaatkan Laporan keuangan tersebut untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi di masa mendatang. Pada dasarnya, akuntansi organisasi sektor publik bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi antara *stewards* dengan *principals*. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pertanggungjawaban atas pengelolaan kekayaan negara, peran akuntansi sangat diperlukan. Prinsip akuntansi dijadikan sebagai standar pelaporan aktivitas pihak manajemen atas pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan.

Dengan adanya keterbatasan, pemilik sumber daya menyerahkan amanah pengelolaan sumber daya kepada pihak lain (*stewards/manajemen*) yang lebih siap. Kontrak hubungan antara *principals* dengan *stewards* didasari dengan kepercayaan, tanggung jawab kepada tujuan organisasi. *Stewardship theory* merupakan model yang cocok dapat diterapkan pada organisasi sektor publik.

Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian yaitu mampu menjelaskan peranan pemerintah sebagai lembaga yang menampung aspirasi publik, dapat dipercaya, dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik bagi masyarakat secara adil dan bertanggung jawab atas keuangan yang sudah diamanahkan, sehingga tujuan ekonomi dan kesejahteraan sosial bisa tercapai secara maksimal dan merata di masyarakat.

**2.2. Konsep Value For Money**

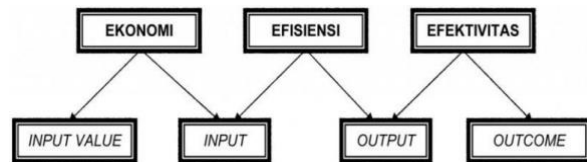
Menurut (Mardiasmo, 2009) *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. **Ekonomi:** pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. **Ekonomi** merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. **Efisiensi:** pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu untuk penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. **Efisiensi** merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. **Efektivitas:** tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

Manfaat implementasi konsep *value for money* pada pemerintah menurut (Mardiasmo, 2009):

- a. Meningkatkan efektifitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran
- b. Meningkatkan mutu pelayanan publik
- c. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input
- d. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik

- e. Meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Secara garis besar pelaksanaan *value for money* pada dasarnya hemat cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien pada dasarnya berdaya guna dalam penggunaan sumber daya sedangkan efektifitas pada dasarnya berhasil guna dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Menurut (Mardiasmo, 2009) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisien dan efektifitas. *Value for money* dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1 Pengukuran Value For Money**

**2.3. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian dari (Andriani, Sri 2012) meneliti tentang “Pengukuran Kinerja Dengan Prinsip *Value For Money* Pemerintah Kota Batu”. Hasil penelitian ini menunjukkan rasio ekonomi tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kota Batu ekonomis dalam merealisasikan pengeluaran karena rasionya kurang dari 100%. Rasio efisiensi tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kota Batu secara umum cukup efisien karena realisasi biayanya lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pendapatannya. Rasio efektifitas tahun 2005 sampai dengan 2009 menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kota Batu secara umum efektif karena hasil rasio nya lebih dari 100%. Hasil diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kota Batu ditinjau dari konsep *value for money* sudah baik karena telah memenuhi ekonomis, efisiensi dan efektifitas.

Berbeda dengan hasil penelitian menurut (Khikmah, 2014) tentang “Pengukuran

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Konsep *Value For Money*". Hasil penelitian dalam pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan konsep *value for money* diperoleh bahwa rasio ekonomis dari tahun 2009-2013 cenderung tidak ekonomis karena menghasilkan rasio lebih dari 100%. Apabila dilihat dari segi efisiensinya, maka kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan cukup efisien karena rasio memperlihatkan hasil kurang dari 100%. Artinya, pemerintah mampu mengelola keuangan daerah dengan menggunakan sumber daya dengan tingkat tertentu untuk dapat mencapai output yang optimal. Dan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan efektif jika dilihat dari rasio efektivitas

### 3. Metode Penelitian

#### 3.1. Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian yaitu kantor imigrasi pangkalpinang.

#### 3.2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini hanya menggunakan sumber data sekunder berupa laporan keuangan yang tersimpan dalam bentuk file baik yang akan dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan kantor imigrasi kota pangkalpinang yang berisi mengenai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja periode 2019-2020.

#### 3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan mengumpulkan data keuangan (anggaran dan realisasi anggaran), dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kantor Imigrasi Kota Pangkalpinang. Metode studi pustaka yang dilakukan peneliti dengan pengumpulan data berdasarkan sumber-sumber yang

diperoleh dari literatur yang membahas tentang konsep *value for money*.

#### 3.4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2017) Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.

#### 3.5. Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini adalah *value for money*. *Value for money* merupakan konsep pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Agustin, 2017). Menurut (Sugiyono, 2017) variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini yaitu konsep *value for money* berdasarkan tiga elemen pengukuran ekonomi, efisien dan efektif. Pencapaian anggaran dan realisasi.

Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Konsep <i>Value For Money</i> Berdasarkan Ekonomis	<i>Value for money</i> berdasarkan ekonomis adalah	Masukan ( <i>input</i> ) dari sumber daya yang dipakai

		perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas dengan harga yang terkecil. Selain itu ekonomi berhubungan dengan sejauh mana organisasi sektor publik bisa meminimalisir sumber daya yang digunakan. (Mardiasmo, 2009)	dalam pelaksanaan suatu kebijakan, program serta aktivitas. <i>Input</i> yang berarti anggaran pendapatan sedangkan <i>input value</i> realisasi pendapatan.
2	Konsep <i>Value For Money</i> Berdasarkan Efisiensi	<i>Value For Money</i> berdasarkan efisien adalah suatu pencapaian keluaran yang tertinggi dengan masukan tertentu atau dapat juga penggunaan masukan terkecil untuk mencapai keluaran tertentu juga merupakan perbandingan yang didapatkan dari keluaran atau masukan yang berhubungan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Mahmudi, 2013).	Keluaran ( <i>Output</i> ) dari hasil yang telah berhasil dicapai dari suatu program, aktivitas serta kebijakan yang telah ditetapkan. <i>Output</i> yang berarti realisasi pengeluaran sedangkan <i>inputnya</i> realisasi pendapatan.
3	Konsep <i>Value For Money</i>	<i>Value for money</i> berdasarkan	<i>Output</i> (pencapaian hasil).

Berdasarkan Efektivitas	efektivitas adalah pencapaian hasil program berdasarkan target yang telah ditetapkan. Apabila dijelaskan secara sederhana, efektivitas adalah perbandingan antara <i>outcome</i> dengan <i>output</i> (Mardiasmo, 2009)	<i>Outcome</i> yang berarti realisasi pendapatan sedangkan <i>output</i> nya anggaran pendapatan.
-------------------------	---	---

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### 4.1. Rasio Ekonomi

Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan (*input*) yang dipergunakan. Masukan (*input*) dari sumber daya yang dipakai dalam pelaksanaan suatu kebijakan, program, serta aktivitas. Kinerja dari Kantor Imigrasi Pangkalpinang dapat dikatakan ekonomis jika *input* lebih kecil dari pada *input value*, yang dimana realisasi lebih kecil dari anggaran yang dibuat.

Berikut ini tabel mengenai anggaran dan realisasi pada Kantor Imigrasi Pangkalpinang tahun 2019-2020.

Tabel 2. Pengukuran Rasio Ekonomi Pada Kantor Imigrasi Pangkalpinang Tahun 2019-2020

No	Jenis Belanja	2019	2020
		Ekonomis (%)	Ekonomis (%)
1	Belanja Pegawai	99.54	99.42
2	Belanja Barang	98.14	79.98
3	Belanja Modal	98.95	97.64
	Jumlah	98.83	91.06

Sumber: Data Olahan

Dilihat dari Tabel 1 pengukuran rasio ekonomi pada kantor imigrasi pangkalpinang tahun 2019-2020, dapat

dikatakan bahwa jenis belanja pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang tergolong dalam kategori ekonomis karena realisasi pada tahun 2019 sebesar 7.633.619.386 atau hanya sebesar 98.93% dari anggaran sebesar 7.723.923.000 dan realisasi untuk tahun 2020 sebesar 9.891.807.485 atau hanya sebesar 91.06% dari anggaran sebesar 10.862.779.000.

Tabel 1 juga menunjukkan bahwa belanja barang pada tahun 2020 merupakan jenis belanja dengan tingkat penghematan tertinggi sebesar 879.683.068 dari anggaran 4.393.693.000 sehingga belanja barang pada tahun 2020 dapat dikatakan ekonomis.

**4.2.Rasio Efisiensi**

Kinerja dari Kantor Imigrasi Pangkalpinang dapat dikatakan efisiensi jika output lebih besar dari pada input, artinya bahwa dengan realisasi yang digunakan bisa menghasilkan output yang lebih besar.

Berikut ini adalah tabel mengenai pengukuran efisiensi pada Kantor Imigrasi Pangkalpinang tahun 2019-2020.

Tabel 3. Pengukuran Rasio Efisiensi Pada Kantor Imigrasi Pangkalpinang Tahun 2019-2020

No	Jenis Belanja	2019	2020
		Efisiensi (%)	Efisiensi (%)
1	Belanja Pegawai	99.54	99.42
2	Belanja Barang	98.14	79.98
3	Belanja Modal	98.95	97.64
	Jumlah	98.83	91.06

Sumber: Data Olahan

Data dari Tabel 2 pengukuran rasio efisiensi pada Kantor Imigrasi Pangkalpinang Tahun 2019-2020, diketahui bahwa jenis belanja pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang tergolong dalam kategori efisien. Rata-rata rasio pada tahun 2019 mencapai 98.93% dan untuk tahun 2020 sebesar 91.06%.

Tabel 2 juga menunjukkan nilai efisiensi tertinggi pada tahun 2020 pada belanja barang sebesar 79.98% dan nilai terendah

ada pada belanja pegawai tahun 2019 sebesar 99.54%.

**4.3.Rasio Efektivitas**

Efektifitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Kantor Imigrasi Pangkalpinang dapat dikatakan efektif apabila *output* lebih besar dari pada *outcome*, artinya bahwa hasil yang dicapai bisa melebihi dari tujuan.

Berikut ini adalah tabel mengenai pengukuran efektivitas pada Kantor Imigrasi Pangkalpinang tahun 2019 – 2020.

Tabel 4. Pengukuran Rasio Efektivitas Pada Kantor Imigrasi Pangkalpinang Tahun 2019-2020

No	Jenis Belanja	2019	2020
		Efektivitas (%)	Efektivitas (%)
1	Belanja Pegawai	100.00	100.00
2	Belanja Barang	100.00	100.00
3	Belanja Modal	100.00	100.00
	Jumlah	100.00	100.00

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan Tabel 3 pengukuran rasio efektivitas pada Kantor Imigrasi Pangkalpinang tahun 2019-2020, dapat diketahui bahwa semua jenis belanja sudah dapat dikatakan efektif. Artinya semua jenis belanja telah tercapai sesuai dengan tujuan yang ditargetkan.

**5.Kesimpulan dan Saran**

**5.1.Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai pengukuran kinerja pada Kantor Imigrasi Pangkalpinang Tahun 2019-2020 dapat disimpulkan bahwa :

- a. Kantor Imigrasi Pangkalpinang Tahun (2019-2020) sudah dapat dikatakan ekonomis karena telah melakukan penghematan sebesar 98.83% pada tahun 2019 dan 91.06% pada tahun 2020.
- b. Kantor Imigrasi Pangkalpinang Tahun (2019-2020) sudah dapat dikatakan efisiensi karena mampu memaksimalkan output sehingga menghasilkan nilai

sebesar 98.83% pada tahun 2019 dan 91.06% pada tahun 2020.

- c. Kantor Imigrasi Pangkalpinang Tahun (2019-2020) sudah dapat dikatakan efektifitas karena mencapai tujuan sehingga menghasilkan nilai sebesar 100.00% pada tahun 2019 dan 100.00% Pada tahun 2020.

## 5.2. Saran

- a. Kantor Imigrasi Pangkalpinang  
Bagi Kantor Imigrasi Pangkalpinang diharapkan pada saat penyusunan perencanaan anggaran belanja barang sebaiknya melakukan survei harga pasar terlebih dahulu untuk menghindari perbandingan jauh pada realisasi dan anggaran ditahun berikutnya.
- b. Peneliti  
Untuk peneliti berikutnya untuk dalam penentuan *outcome*, sebaiknya melakukan penyebaran angket kepada masyarakat agar dapat diketahui nilai *outcome* yang lebih riil.

Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN.

Khikmah, Alayyal. (2014). *Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Berdasarkan Konsep Value For Money*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Sadjijono, (2007). *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung :CV.Alfabeta.

## Daftar Pustaka

- Agustin, Risa Dwi. (2017). *Konsep Value For Money Dalam Mengukur Kinerja Pelayanan Sektor Publik*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol (6) No 6, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.e-ISSN : 2460-0585
- Andriani, Sri. (2012).*Pengukuran Kinerja Dengan Prinsip Value For Money Pemerintah Kota Batu*. El Muhasaba: Jurnal Akuntansi, 3(1), 1-22.  
DOI:<https://doi.org/10.18860/em.v3i1.2349>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). *Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns*. Australian Journal of Management, 16: 49-64.
- Haliah, 2012, “Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya”,*Disertasi Doktor pada FPS UNHAS Makassar*.